

## ANALISIS WACANA & ANALISIS WACANA KRITIS BERITA KONFLIK BURUH PT. FREEPORT INDONESIA

D. Jupriono<sup>1</sup>, Andia Jingga L.P.T.<sup>2</sup>, Anik Cahyaning Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya; juprion@untag-sby.ac.id

<sup>2</sup>Magister Ilmu Komunikasi, FIKOM, Unitomo Surabaya;

yongiiyong96@gmail.com

<sup>3</sup>Sastra Inggris, FIB, Untag Surabaya; anikcahyaning@untag-sby.ac.id

**ABSTRACT.** Descriptive discourse analysis (DDA) considers discourse as a bigger language unit than sentence and as merely neutral linguistic phenomenon, meanwhile critical discourse analysis (CDA) (Foucault) sees discourse as constructed linguistic practice which builds social practice to change or keep power dominance. If the focus of DDA is on cohesion-coherence of text in making the unity of textual meaning, the focus of CDA is on the totality of relation of discourse which reveals and hidden to uncover the relation of power dominance among the groups inside. In DDA conclusion of the text of Freeport mine labor conflict news is: "Intimidation act of the strike labors towards the non-strike labors has caused PT Freeport to stop the production activity". In CDA the text of the same news will be interpreted as: "Salary range based on race discrimination in Freeport labors increases horizontal conflict which is reconciled through dialogues under the control of company, so it guarantees labor's obedience and productivity and covers the reality at once that Freeport gets so big benefit, Freeport exploitation has destroyed environment, and Timika people are still in poverty".

**Key words:** *descriptive discourse analysis, critical discourse analysis, cohesion-coherence, hidden element, knowledge-power*

### PENDAHULUAN

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang emas, tembaga, silver, *molybdenum*, *rhenium*, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (USA). Sebagai pembayar pajak terbesar kepada Indonesia, PT Freeport Indonesia merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Freeport telah melakukan eksplorasi di Papua, tepatnya di Erstberg (dari 1967) dan Grasberg (sejak 1988), Tembaga Pura, Timika, Provinsi Papua. Keuntungan triliunan direguk oleh Freeport yang berkolusi dengan penguasa, sebaliknya penduduk setempat hanya menjadi buruh yang justru mengalami kekerasan, pengusiran, penganiayaan, serta kerusakan lingkungan tiada tara. (VOA, 2017).

Memang, Freeport sering memicu konflik. Ada konflik penduduk setempat dengan perusahaan beserta aparat keamanan; konflik buruh Freeport dengan perusahaan; konflik antarburuh, yakni sekelompok buruh yang penduduk asli dengan kelompok buruh pendatang.

Sehubungan dengan analisis bahasa wacana (*discourse analysis*), konflik Freeport sungguh menarik untuk dianalisis. Sayang sekali, itu masih menjadi

barang langka! Analisis wacana dimaksud mencakup baik analisis wacana yang berparadigma deskriptif, atau bisa disebut “analisis wacana deskriptif” (AWD; *descriptive discourse analysis*), maupun yang berparadigma kritis, atau “analisis wacana kritis” (AWK, *critical discourse analysis*). (Haryatmoko, 2013; 2016).

AWD lebih sering disebut sebagai analisis wacana saja—tanpa kata *deskriptif*! Dalam AWD, wacana dipandang sebagai unit bahasa yang lebih besar di atas kalimat atau klausa (Brown & Yule, 1988). Teks ujaran atau paragraf, dalam AWD, lazim dianalisis dari sisi komponen wacana (konteks situasi, kohesi-kohherensi, prinsip interpretasi lokal dan analogi, dst.. Meskipun tampak lengkap, wacana dalam AWD hanya dipandang sebagai fenomena lingual semata-mata. Maka, AWD gagal menangkap dimensi konflik dan selubung kuasa di balik teks: penindasan, ketimpangan sosial, ideologi, relasi dominasi-subordinasi.

Kegagalan tersebut agaknya dapat diatasi oleh AWK. Wacana, dalam perspektif AWK, merepresentasikan realitas sosial yang penuh dengan selubung dominasi kekuasaan dan konflik (cf. Haryatmoko 2010; Jupriono, Sukristyanto, Darmawan, 2016). AWK memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praksis sosial (berbicara, berpikir, bertindak) untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan (Wodak, 2010).

Tokoh AWK yang memberi banyak perhatian pada dimensi kekuasaan secara khas adalah Michel Foucault (1926-1984), seorang filosof-kekuasaan berkebangsaan Prancis (Kelly 2010). Menurut Foucault, kekuasaan itu menyebar tanpa bisa dilokalisasi, “ada di mana-mana”, meresap dalam seluruh relasi sosial; subjek kekuasaan tidak harus seorang raja, perdana menteri, atau presiden terhadap rakyatnya (cf. Jupriono, 2011), bahkan ia bisa muncul dalam relasi suami istri, sepasang kekasih, dokter-pasien, psikiater-klien, dosen-mahasiswa, mandor-kuli, dst. (cf. O'Farrell, 2007). Ia tidak dimonopoli siapa pun, tetapi beroperasi dalam relasi pengetahuan dan situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan merupakan tatanan disiplin yang melekat pada ambisi pengetahuan, yang tidak selalu represif, tetapi produktif. Ia muncul manakala terdapat perbedaan dan diskriminasi. Kontrol kekuasaan dijalankan dengan mekanisme disiplin, normalisasi, sistem panoptik, klasifikasi, dan identifikasi (Haryatmoko, 2010; 2012). Tokoh yang meninggal digerogoti AIDS ini berbicara bagaimana kuasa dilihat, diterima, dipraktikkan sebagai kebenaran dan berfungsi dalam bidang-bidang tertentu.

Teknik AWK Foucault bukan saja lain sama sekali dari AWD, melainkan juga berbeda dengan sesama AWK versi lain (van Dijk, Fairclough, van Leeuwen, Mills, Fowler, dan mungkin juga Derrida). Yang menonjol dalam AWK-Foucault adalah ditekankannya pencarian unsur-unsur wacana yang absen/tersembunyi serta kontekstualisasi unsur wacana dalam jaringan kekuasaan-pengetahuan (Alba-Juez, 2009).

Fokus kajian ini adalah analisis teks konflik buruh tambang Freeport dalam perbandingan antara perspektif AWD dan AWK. AWK yang dipilih dalam kajian ini adalah AWK Foucault.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini bertipe kualitatif. Datanya dijaring dengan teknik dokumentasi. Data utamanya adalah berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Aksi Intimidasi Karyawan” (*Berita Metro*, 28 Feb. 2012: 5). Data ini terbangun dari 11 paragraf. (Data dilampirkan di akhir artikel).

Analisis data dilakukan ke dalam dua tahapan. Pertama, data (teks paragraf berita buruh Freeport) dianalisis dalam perspektif AWD dari sisi: (i) konteks situasi, (ii) kohesi-koherensi, (iii) prinsip interpretasi lokal dan analogi, (iv) implikatur, (v) pranggapan, (vi) referensi-inferensi, (vii) pengetahuan tentang dunia pada umumnya. Kedua, data dianalisis menurut perspektif AWK melalui langkah-langkah: (i) seleksi topik, (ii) pendalaman data, (iii) identifikasi tema, (iv) pencarian unsur-unsur wacana yang absen/ tersembunyi, (v) pencarian relasi makna antar unsurwacana, dan (vi) kontekstualisasi unsur wacana dalam jaringan kekuasaan-pengetahuan (Alba-Juez, 2009; Haryatmoko, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Buruh Freeport: Analisis Wacana Deskriptif (AWD)

Pertama yang ditelaah dalam AWD adalah konteks situasi wacana yang interpretasinya banyak bergantung pada ko-teks (*co-text*), prinsip penafsiran lokal, dan prinsip analogi. Relasi antarwacana (ko-teks) pada data terjalin cukup baik. Relasi ko-teks antara p1 dan p2, misalnya, terbangun dari frase *beberapa waktu lalu* (p1) dan frase *beberapa hari terakhir* (p2). Relasi ko-teks yang lain terjalin antara p5 (*membangun komunikasi*), p6 (*mencari solusi bersama*), dan p10 (*membicarakan masalah yang terjadi*).

*Prinsip penafsiran lokal* dan *prinsip analogi* juga tidak menyulitkan pembaca. Penganiayaan oleh beberapa karyawan *beberapa waktu lalu* (p1) tidak akan mengacu pada tahun lalu (2010, misal), tetapi satu bulan sebelumnya, Januari—Februari 2012. Tafsir ini didasarkan pada kebiasaan bahwa pembaca tidak akan membentuk konteks yang lebih besar melebihi yang dibutuhkan untuk sampai pada suatu tafsiran (Brown & Yule 1988: 59). Prinsip analogi akan dioperasikan pembaca saat menemukan *lokasi perusahaan* (p4), yang dimaksudkan pastilah lokasi-lokasi aksi intimidasi antarburuh dan perusahaan yang dimaksud pastilah PT Freeport. Begitu juga pihak *Serikat Pekerja* (p6, 8) oleh pembaca akan ditafsirkan sebagai Serikat Pekerja PT Freeport. Tafsir ini muncul sebagai akibat pengalaman pembaca sebelumnya bahwa dalam perusahaan memang terdapat pihak buruh, manajemen, dan serikat pekerja. Analogi menjadi dasar baik bagi penulis maupun pembaca dalam menentukan tafsir pada konteks untuk mendapatkan tempat berpijak yang sama (Brown & Yule 1988).

Ide-ide isi keseluruhan teks berita terjalin satu sama lain, memenuhi **kohesi** dan **koherensi** wacana. Kohesi teks terjalin secara formal dengan ditandai alat-alat kohesi yang berwujud pronomina, substitusi, elips, konjungsi, dan leksikon (Halliday & Hasan, 2014), sehingga hubungan antarkalimat dan antarparagraf cukup kohesif. Kekohesifan tersebut membuat relasi semantik antarproposisi dan antarteks menjadi runtut (koheren).

Alat kohesi berupa pronomina penunjuk, misalnya kata *itu* pada *perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu* (p4) mengacu pada Freeport Indonesia Timika (p1, 2, 3, 4); *tersebut* (p6) menunjuk PT Freeport Indonesia di Timika (p1). Pronomina penanya tampak pada p5 (*apa* yang terjadi, langkah *apa* yang sudah dilakukan) yang membangun kohesi wacana dengan paragraf sebelumnya: p1 dan p3 (aksi intimidasi), p1—p4 (terhentinya produksi). Pronomina persona *mereka* (p3, 9, 10) menunjuk pada karyawan PT Freeport yang tidak ikut mogok, menjalin relasi antarparagraf.

Substitusi juga dimanfaatkan untuk membangun kohesi antarteks, misalnya *solusi* (p6) menggantikan *langkah-langkah* dan *komunikasi* (p5); *masalah apa yang terjadi* (p5) menggantikan *situasi dan kondisi yang terjadi* (p4); *lokasi perusahaan* (p4) menggantikan *areal kerja* dan *beberapa titik* (p3).

Alat kohesi elips ada di awal teks. Aksi intimidasi bahkan *penganiayaan oleh para karyawan* (p1) menyelubungkan “karyawan lain yang tidak ikut mogok” (p3, 9, 10), sbb.:

PT Freeport Indonesia menghentikan sementara proses produksinya ... karena terjadi aksi intimidasi ... penganiayaan oleh para karyawan yang beberapa waktu lalu menggelar mogok kerja di Timika. (p1)

“Intimidasi yang dilakukan karyawan peserta mogok kerja terhadap rekan-rekan mereka ... (p3)

“Di antara pekerja ...telah melakukan tindakan kekerasan ... terhadap rekan-rekan mereka yang tidak mengikuti aksi mogok kerja ... (p9)

... masalah yang terjadi antara karyawan yang mogok kerja dengan rekan-rekan mereka yang tidak ikut mogok kerja ... (p10)

Konjungsi antarkalimat tidak ditemukan, tetapi konjungsi antarparagraf muncul di paragraf akhir (p11), yakni *bersamaan dengan itu* yang merujuk pertemuan seluruh karyawan Freeport (p10). Sebagai teks jurnalistik, rendahnya frekuensi penggunaan konjungsi ini wajar.

Kohesi leksikal dalam berita konflik buruh Freeport berupa pengulangan bentuk dan superordinate (Halliday & Hasan, 2014). Pengulangan bentuk *proses produksi* terjadi (p1, 2), *aktivitas produksi* (p3, 4). Pengulangan dengan perubahan terjadi pada *aksi intimidasi* (p1) yang diulang sebagai *intimidasi* (p3) dan *tindakan kekerasan dan intimidasi* (p9). Begitu pula *PT Freeport Indonesia* (p1) diulang sebagian sebagai *PT Freeport* (p2, 3, 4, 6, 7, 8, 11) atau *Freeport* (p5). Pengulangan *mogok kerja* terjadi (p1, 3, 10) , diulang dengan perubahan sebagai *aksi mogok kerja* (p9). Pemanfaatan superordinat digunakan pada frase *gangguan operasional* (p7) yang berelasi dengan frase *aksi intimidasi* dan *penganiayaan* (p1, 3), *kekerasan dan intimidasi* (p9). Demikian juga superordinat pada *manajemen Freeport* (p4, 5, 6) dengan *PT Freeport* (p1, 8).

Karena alat-alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal, dimanfaatkan dengan cukup baik, sehingga keterpaduan kohesif seluruh teks terbina, dengan sendirinya keruntutan (**koherensi**) wacana teks berita tersebut juga tercapai. Meskipun demikian, koherensi wacana di sini tidak hanya bergantung pada hadirnya alat-alat kohesi, lebih dari itu juga ditentukan oleh latar belakang

pengetahuan pembaca terhadap pokok permasalahan konflik buruh Freeport, soal-soal sosial budaya, serta kemampuan pembaca menafsirkan hal-hal implisit di balik wacana (van de-Velde 1984). Dalam hal demikian sebagai pembaca, penulis tentu memiliki latar belakang wawasan mengenai PT Freeport dengan segala kontroversi dan konflik buruhnya, gerakan buruh, dan kondisi kehidupan buruh, kebijakan negara terhadap buruh, dst.

Wacana berita konflik buruh Freeport juga menggiring pembaca untuk menarik *implikasi tekstual* dan *konvensional* yang relevan (Brown & Yule, 1988). Relevansi implikasi tekstual didasarkan pada aspek kebahasaan yang hadir pada teks, sedang implikasi konvensional didasarkan pada pengetahuan tentang dunia, yakni pengetahuan pembaca terhadap pokok permasalahan konflik buruh Freeport, soal-soal sosial budaya masyarakat Papua di Timika. Kondisi kohesi dan koherensi wacana turut mempermudah pembaca menarik implikasi tekstual. Misalnya deiksis *-nya* pada *menyelesaikannya* (p6) akan menggiring pembaca pada tafsir berhentinya proses produksi Freeport akibat konflik antarburuh (p1—p5).

**Praanggapan** (*presupposition*) yang mungkin berdasar sajian teks berita juga tidak menyulitkan pembaca. Pada p4, misalnya—*Ia mengatakan hingga saat ini manajemen PT Freeport belum memberikan laporan secara resmi ... kepada Pemkab Mimika*—mengandung praanggapan bahwa: (a) berhentinya proses produksi dan konflik antarkaryawan Freeport sudah terjadi beberapa hari sebelumnya; (b) Timika Pemkab sudah mendengar (tetapi belum menerima laporan) gangguan produksi dan konflik tersebut; (c) Pemkab Timika mengharapkan PT Freeport segera memberika laporan secara resmi.

Jika unsur-unsur lain cukup sukses mengkomunikasikan pesan teks, tidak demikian halnya dengan **referensi** dan **inferensi** wacana. Tidak semua referensi wacana yang dipaparkan penulis teks berita dapat memudahkan pembaca menarik inferensi secara efisien-efektif. Klausa *membangun komunikasi* (p5), misalnya, sebenarnya tidak mempercepat pembaca menarik inferensi tentang apa yang dimaksudkan pembicaranya (*Kadis Tenakertrans Timika Dionisius Mameyau*, p2). Demikian juga *semua persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama* (p8) tidak memudahkan pembaca berinferensi secara tepat.

Secara keseluruhan, harus diakui bahwa wacana berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” dalam perspektif AWD cukup berhasil membangun kohesi dan koherensi wacana serta efektif dalam menarik implikasi, praanggapan, penafsiran lokal dan analogi, biarpun tidak efektif menyuguhkan referensi wacana, sehingga juga tidak membantu pembaca menarik inferensi. Berdasarkan unsur-unsur ini, makna keseluruhan teks wacana berita tersebut adalah bahwa *aksi intimidasi antarkaryawan menyebabkan Freeport memberhentikan sementara produksinya*.

#### **Konflik Buruh Freeport: Analisis Wacana Kritis (AWK)**

Analisis teks berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” dalam perspektif AWK Foucault dalam dalam kertas kerja ini mengikuti formula yang disusun Alba-Juez (2009) berikut: (i) seleksi topik, (ii) pendalaman data, (iii) identifikasi tema, (iv) pencarian unsur-unsur wacana yang

absen/ tersembunyi, (v) pencarian relasi makna antarunsur wacana, dan (vi) kontekstualisasi unsur wacana dalam jaringan kekuasaan-pengetahuan.

Pada langkah (i) **seleksi topik**, pembaca dihadapkan pada beberapa topik. Topik utama, tentu saja, adalah terhentinya proses produksi Freeport akibat konflik antarburuh. Jika diformulasikan sesuai dengan bahasa Foucault, topik ini langsung bersangkutan dengan konsep kekuasaan yang menyebar dan produktif dengan mekanisme prosedur pelarangan, diskriminasi, dan oposisi (Haryatmoko, 2012; 2016). Dalam konteks PT Freeport kekuasaan tidak hanya dipraktikkan oleh pihak manajemen, tetapi juga di antara karyawan, yakni antara karyawan yang melancarkan mogok kerja dan yang tidak mogok kerja (p3, 9, 10). Prosedur pelarangan, diskriminasi, dan oposisi—berarti di arena ini relasi dominasi-subordinasi kekuasaan sedang beroperasi—tampak antara: karyawan yang mogok dan karyawan yang tidak mogok (p3, 9, 10), Pemkab Timika dan manajemen PT Freeport (p4, 5), serikat pekerja dan manajemen Freeport (p8), serta serikat pekerja dan Kapolda Papua (p11).

**Pendalaman data** (ii) ditempuh dengan memahami teks data utama berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” (*Berita Metro*, 28 Feb. 2012). Ini diikuti dengan melacak informasi dari teks lain yang relevan. Untuk ini tidak diabaikan berita-berita: “Unjuk Rasa Karyawan Freeport Berujung Bentrok” (*Fajar*, 11 Okt. 2011); “Freeport Kembali Bergejolak”, *Kontan*, 24 Feb. 2012; “Pekerja Bersengketa, Freeport Hentikan Produksi”, *Kontan*, 27 Feb. 2012; “Hatta: Royalti Freeport Jangan Hanya 1%”, *www.tribunnews.com*, 21 Feb. 2012; “Laba Freeport Mengalami Penurunan 60%”, *www.tribunnews.com*, 21 Jan. 2012; “Freeport Indonesia”, <http://id.wikipedia.org/wiki>, Jan. 2012.

**Identifikasi tema** (iii), langkah selanjutnya, terhadap teks-teks berita tsb. mendeskripsikan tema-tema berikut. (a) Kekuasaan itu produktif: Freeport mengeruk keuntungan sangat besar dengan mengeksploitasi habis-habisan lingkungan alam Timika. (b) Kekuasaan itu menyebar dengan mekanisme diskriminasi: Intimidasi karyawan dilakukan oleh karyawan penduduk asli terhadap karyawan penduduk pendatang karena perbedaan upah buruh yang diterima. (c) Teknik panoptik efektif untuk menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan karyawan: serangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh Kapolda, Pemkab Timika, dan kesepakatan PKB secara halus merupakan kontrol kendali yang tidak kasat mata, yang membuat pihak-pihak yang bersengketa “terpaksa” mematuhi regulasi dan pendisiplinan situasi. (cf. Haryatmoko, 2016).

**Unsur-unsur absen/terselubung** (iv) di balik teks berita utama “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” adalah: (a) apa saja faktor penyebab sekelompok buruh (kelompok I) mengintimidasi dan menganiaya kelompok buruh lain (kelompok II); (b) apa saja pokok-pokok Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII antara PT Freeport dan Serikat Pekerja; (c) mengapa narasumber berita yang diwawancarai hanya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius (p2-5) dan juru bicara PT Freeport Ramdani Sirait (p7-8).

Jika teks berita data utama dipelototi, tidak akan ditemukan secara eksplisit apa sebenarnya penyebab kelompok I melakukan kekerasan kepada kelompok II. Tetapi, untunglah, empat kali disebut bahwa kelompok buruh pelaku kekerasan

adalah mereka yang beberapa hari sebelumnya melakukan aksi *mogok kerja*, sedang kelompok korban adalah buruh-buruh yang tidak ikut aksi mogok tsb. (p1, 3, 9, 10). Mogok kerja ini menjadi kata kunci untuk menyingkap tabir realitas yang terselubung di balik wacana; ia menjadi *entry point* bagi pengenalan persoalan lebih besar. Dengan meminta bantuan dari langkah kedua (pendalaman data), pembaca akan tergiring untuk bertanya: mengapa kelompok I nekat mogok kerja; apa yang dituntut; siapa (dari kalangan mana) sebenarnya kelompok pertama ini? (Pembaca perlu diingatkan, semua pertanyaan ini mustahil terjawab dalam teks data utama!). Kelompok I mogok kerja karena aspirasi mereka tentang penyetaraan upah tidak pernah ditanggapi. Tuntutan kelompok I adalah penyetaraan upah kerja mereka dengan upah kerja kelompok II. Kelompok I berasal dari tujuh suku penduduk asli Papua, sedang kelompok II dari luar Papua. (Fajar, 11 Okt. 2011). Adalah cukup menarik bahwa insiden unjuk rasa buruh berujung bentrok yang melukai 9 orang dan menewaskan 1 korban tsb. (10 Okt. 2011) masih menjadi berita utama hingga 5 bulan berikutnya ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 27 Feb. 2012).

Apa saja pokok-pokok isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII antara PT Freeport dan Serikat Pekerja PT Freeport merupakan unsur terselubung berikutnya. Tidak diketahui secara pasti apa isinya. Berdasarkan pengetahuan standar pada umumnya, PKB tersebut mestinya berisi kesepakatan tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi kedua belak pihak. Akan tetapi, terdapat wacana lain yang sering dilupakan, padahal hal lain tersebut justru lebih besar yang terungkap lewat media massa mengenai, a.l., fakta empiris di lapangan (*Kompas*, 20 Feb. 2012: 1), yakni:

“Usaha pertambangan di Tanah Air hingga saat ini lebih banyak memicu beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan tidak terkendali, hingga ujung-ujungnya tindakan kriminal dan kekerasan. Praktik usaha ini pun belum banyak memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat”

PT Freeport Timika pun sangat rakus mengeksploitasi alam Timika dan selama bertahun-tahun mengeruk keuntungan bertriliun-triliun. Semua ini berjalan mulus berkat kolusinya dengan pejabat setempat dan oknum TNI. Rakyat Timika—seperti bias ditebak—tetap terpuruk dalam kemelaratan dan lingkungan alam yang rusak tiada tara (VOA, 2017).

Unsur terselubung selanjutnya adalah mengapa narasumber berita yang diwawancarai hanya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius (p2-5) dan juru bicara PT Freeport Ramdani Sirait (p7-8). Tentu bukan kebetulan bahwa harian *Berita Metro* (28 Feb. 2012) mewawancarai kedua narasumber. Dalam perspektif Foucault (Kelly, 2010; Haryatmoko, 2016), wacana merupakan praktik terorganisasi dan mengorganisasikan otonomi dan klaim atas kebenaran pengetahuan. Maka, kedua tokoh dalam konteks ini dianggap diuntungkan oleh struktur sosial yang membenarkan mereka mempraktikkan otonomi dan pengetahuan. Mengapa wartawan *Berita Metro* menanyai kedua tokoh—dan bukan tokoh lainnya—itu sudah menjadi *episteme*,

sebagai struktur pemaknaan yang dominan pada zaman ini (cf. O'Farrell, 2007; Haryatmoko, 2012) dari wartawan: bahwa yang paling layak ditanyai adalah kedua tokoh; bahwa setiap ada peristiwa, yang harus diwawancarai adalah juru bicara, bukan pelaku atau korban, misalnya.

Mengapa tidak tampak hasil investigasi yang meliputi aspirasi kelompok I dan II, padahal justru kedua kelompok ini yang terlibat konflik? Lagi-lagi harus diakui bahwa struktur pemaknaan yang beroperasi dan mendominasi benak-benak kepala wartawan (episteme tadi) adalah seperti itu. Episteme yang berlaku di zaman ini adalah: orang yang dianggap paling mengetahui (yang menguasai pengetahuan) bukanlah orang yang terlibat langsung dalam suatu kasus, melainkan orang yang diakui secara struktur sosial sebagai pemegang pengetahuan tentang suatu kasus itu. Dalam perspektif Foucault, pengetahuan adalah sebuah rezim episteme yang terorganisasi dan mengorganisasi, misalnya dalam psikiatri, kedokteran, jurnalisme, ekonomi, yang sanggup mengubah konstelasi sosial dan menghasilkan sesuatu (produktif) (Haryatmoko, 2012; 2016).

Ketiga unsur terselubung tersebut merepresentasikan kekhasan konsep Foucault tentang beroperasinya kekuasaan (Haryatmoko 2010a; cf. Sukristyanto, Jupriono, Darmawan, Maryono, 2018). Representasi ini menandai dimulainya tahap (v) penentuan **relasi makna antarunsur wacana**, baik unsur manifes maupun yang laten. Menurut Foucault (Haryatmoko 2016), kekuasaan berawal dari praktik diskriminasi. Ia lebih dipraktikkan ketimbang dimiliki, yang dijalankan dari tataran mikro bagai pipa kapiler (dari bawah ke atas). Kekuasaan tidak lagi melalui negatif (menindas, menyensor), tetapi juga produktif yang berasal dari individu-individu yang terhegemoni oleh sistem yang menjamin kepatuhan, normalisasi, dan kedisiplinan tubuh.

Dalam kasus konflik buruh Freeport, praktik kekuasaan kali pertama dilancarkan oleh kelompok I (penduduk asli Papua) kepada kelompok II (pendatang dari luar Papua). Ini terjadi karena adanya diskriminasi upah di antara kedua kelompok. Konflik ini meletup di kalangan buruh tataran bawah, kemudian berdaya kapilaritas merambat ke tataran vertikal, menggerakkan berbagai praktik kuasa baru di level manajemen dan institusi di atasnya (juru bicara Freeport [p7], Pemkab Timika [p6], sampai Kapolda Papua [p11]). Ketika Pemkab Mimika mengharapkan laporan dari Freeport tentang kasus intimidasi antarkaryawan yang mengakibatkan berhentinya produksi (p4, p5), ketika Pemkab merencanakan memfasilitasi pertemuan manajemen Freeport dan Serikat Pekerja (p6), ketika Kapolda Papua menggelar pertemuan dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT Freeport (p11), di situlah sedang tergelar kehendak mengetahui sebagai awal dipraktikkannya dominasi terhadap objek dan manusia/kelompok lain. Strategi kekuasaan melekat pada kehendak mengetahui; ingin tahu berarti ingin kuasa. Kekuasaan melekat pada pengetahuan (cf. Haryatmoko 2010; Jupriono, Sudaryanto, Sumarah, 2016).

Sasaran kekuasaan adalah kepatuhan tubuh individu dan sosial, agar produktivitas meningkat. Perbedaan antara kelompok I yang asli populasi Papua (ras Negrid, berkulit gelap) dan kelompok II dari luar Papua (ras Mongolid-Malayid, berkulit terang) jelas-jelas merupakan praktik politik tubuh. Foucault (dlm. Haryatmoko, 2012; 2016) memperkenalkan terminologi baru *biopolitik*,



yakni pengendalian kehidupan masyarakat melalui regulasi dan normalisasi pendisiplinan tubuh penduduk, jaminan sosial, pajak, kesehatan, urbanisasi (cf. Eriyanto, 2018). Dalam konteks ini perbedaan upah antara kelompok I dan kelompok II buruh Freeport dapat dipahami sebagai praksis telanjang biopolitik. Tubuh-tubuh dibuat patuh, didisiplinkan melalui serangkaian regulasi industri kapital (syarat masuk, jam kerja, target produksi, *job description*, pengupahan, sanksi, dll.) agar produktivitas meningkat. Namun, selalu saja terjadi: di mana digelar kekuasaan, di situ muncul resistensi (Haryatmoko, 2016) sebab kekuasaan tersebar dan datang dari mana-mana (Eriyanto, 2018).

Akhirnya, analisis terhadap teks berita “Produksi Freeport Berhenti Sementara Akibat Aksi Intimidasi Karyawan” (*Berita Metro*, 28 Feb. 2012) dari perspektif AWK Foucault memasuki tatatara pamungkasnya (vi): **kontekstualisasi unsur wacana** kekuasaan-pengetahuan. Berdasarkan langkah sebelumnya (i—v), unsur-unsur wacana akan dikontekstualisasikan ke dalam totalitas wacana kekuasaan dan pengetahuan pada konflik buruh Freeport. Kontekstualisasi tersebut dinarasikan sbb.

PT Freeport memberikan upah kepada buruh asal penduduk asli Papua jauh di bawah upah buruh asal luar Papua. Perbedaan ini memicu aksi mogok buruh asli Papua. Karena tidak mendukung aksi ini, buruh asal luar Papua dintimidasi oleh buruh asli Papua. Konflik antarburuh ini didamaikan melalui serangkaian pertemuan dialog antara kedua kelompok buruh di bawah pengawasan Pemkab Timika, manajemen PT Freeport, dan Kapolda Papua. Gencarnya pendekatan dialogis ini membuat para buruh memilih patuh dan menyudahi aksi mogok kerja dan bentrok antarburuh serta menggiring mereka kembali bekerja normal, sehingga produktivitas makin meningkat. Akan tetapi, publik pembaca menjadi lupa bahwa PT Freeport yang berkolusi dengan segelintir pejabat dan oknum TNI telah mengeruk keuntungan sangat besar selama berpuluh-puluh tahun dengan mengeksploitasi habis-habisan tanah Timika, sehingga merusak lingkungan alam Timika tiada tara, sementara kehidupan rakyat Timika tetap terpuruk dalam kemelaratan.

Akhirnya, berbeda dari AWD, AWK akan memformulasi kontekstualisasi antarunsur wacana ke dalam simpulan: *Diskriminasi upah berdasarkan perbedaan ras di kalangan buruh Freeport memicu konflik horizontal yang didamaikan melalui serangkaian dialog yang berlangsung di bawah kendali perusahaan, sehingga menjamin kepatuhan dan produktivitas buruh sekaligus menutupi dampak buruk eksploitasi dan kerakusan PT Freeport Indonesia serta kemelaratan masyarakat sekitar Freeport.*

## SIMPULAN

AWD memandang wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar di atas kalimat dan sebagai fenomena lingual netral semata-mata, sedang AWK (Foucault) memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik sosial untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Jika fokus AWD pada kohesi-koherensi unsur teks dalam rangka membulatkan kesatuan makna tekstual, fokus AWK pada totalitas relasi unsur wacana yang manifes dan yang terselubung untuk membongkar relasi dominasi

kekuasaan antarkelompok di dalamnya. Dalam AWD simpulan teks berita konflik buruh tambang Freeport adalah: “Aksi intimidasi kelompok buruh yang mogok kerja terhadap kelompok buruh lain yang tidak mogok kerja mengakibatkan PT Freeport menghentikan aktivitas produksinya”. Dalam AWK teks berita yang sama akan dimaknai sebagai: “Perbedaan upah berdasarkan diskriminasi ras di kalangan buruh Freeport memicu konflik horizontal yang didamaikan melalui serangkaian dialog di bawah kendali perusahaan, sehingga menjamin kepatuhan dan produktivitas buruh sekaligus menutupi realitas bahwa Freeport mengeruk keuntungan sangat besar, eksploitasi Freeport merusak lingkungan, serta rakyat Timika tetap melarat”.

Menurut Foucault, pengetahuan itu jalur kekuasaan (Haryatmoko, 2010; 2016). Maka, objektivitas-netralitas pengetahuan itu omong kosong; pengetahuan senantiasa berpihak. Penulis pun terus terang berada dalam barisan AWK! Boleh jadi, karena itulah, penulis lebih cepat menemukan kelemahan AWD ketimbang AWK.

Teks wacana dibangun untuk kegiatan dasar interaksi antarmanusia (*human interaction*). Ia selalu muncul dalam peristiwa komunikatif (*communicative occurrence*). Untuk itu, ada tujuh standar tekstualitas yang tidak bisa ditawar-tawar, *constitutive principles*, harus dipenuhi: kohesi, koherensi, intensionalitas, keberterimaan, informativitas, situasionalitas, dan intertekstualitas (de Beaugrande & Dressler, 2016). Ketujuh standar tekstualitas ini lazim berkembang dalam Tradisi linguistik Eropa Kontinental, sedangkan dalam tradisi linguistik Anglo-Amerika standar tekstualitas terfokus melulu pada kohesi-koherensi wacana (Santoso, 2000; 2010). Dalam hal ini jelaslah kiranya bahwa AWD tidak memenuhi, sedang AWK memenuhi standar tekstualitas tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alba-Juez, L. (2009). *Perspectives on discourse analysis: Theory and practice*. Cambridge: Cambridge S.P.
- Brown, G.; Yule, G.. (1988). *Discourse analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- de Beaugrande, R.A.; Dressler, W.U. (2016). *Introduction to text linguistics*. Ed. III. Harlow-Essex: Longman.
- Eriyanto. (2018). Wacana: Perspektif Foucault, hal. 65-84 dlm. *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKIS.
- Halliday, M.A.K.; Hasan, R. (2014). *Cohesion in English*. London: Routledge Ltd. (e-book).
- Haryatmoko. (2010). Michel Foucault membuka kedok pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran, (hal. 8-13) dlm. *Dominasi penuh muslihat: Akar kekerasan dan diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. (2012). Michel Foucault dan politik kekuasaan: Membongkar teknik, mekanisme, dan strategi kekuasaan. Materi *Pelatihan analisis wacana Michel Foucault*. UK2JT, FIB Unair, 1 Maret 2012.
- Haryatmoko. (2013). Critical discourse analysis (analisis wacana kritis). (Tidak dipublikasikan). Materi *Pelatihan analisis wacana: Teori dan aplikasi*, UK2JT, Unair Surabaya, 28 Nov. 2013.

- Haryatmoko. (2016). *Critical discourse analysis: Landasan teori, metodologi, penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jupriono, D. (2011). Bahasa politik pencitraan Presiden SBY dalam perspektif linguistik kritis, *Prosiding Seminar Nasional Linguistik & Sastra Dahulu, Sekarang dan Akan Datang*, hal. 111-122. Surabaya: ITS Press & Prodi Sastra Inggris FISIB Unijoyo Bangkalan.
- Jupriono, D.; Sudaryanto, E.; Sumarah, N. (2016). Retorika politik Jokowi: Kalimat aktif untuk keberhasilan, kalimat pasif untuk kegagalan. *Proceeding International Conference of Communication, Industry and Community*. Jilid 3, hal. 1035-1045. Jakarta: Fikom Untar.
- Jupriono, D.; Sukristyanto, A.; Darmawan, A. (2016). Komunikasi politik Jokowi: Analisis wacana kritis. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa & Sastra 8*, hal. 44-50. Bangkalan: Prodi Sastra Inggris, FISIB, UTM.
- Kelly, M. (2010). Michel Foucault. *Internet Encyclopedia of Philosophy*. [www.iep.utm.edu/foucault/](http://www.iep.utm.edu/foucault/). Akses 17 Agustus 2019.
- Mills, S. (2004). Michel Foucault and discourse, dlm *Discourse*. London-New York: Routledge.
- O'Farrell, C. (2007). Key concepts. [www.michel-foucault.com/concepts/index.html](http://www.michel-foucault.com/concepts/index.html). Akses 17 Agustus 2019.
- Santoso, A. (2000). Paradigma kritis dalam kajian kebahasaan. *Bahasa dan Seni* 28(2) Agustus: 127-146.
- Santoso, A. (2010). Teori wacana: Dari paradigma deskriptif ke paradigma kritis. [http://studibahasakritis.blogspot.com/2010/05/teori-wacana-dari-paradigma-deskriptif\\_08.html](http://studibahasakritis.blogspot.com/2010/05/teori-wacana-dari-paradigma-deskriptif_08.html). Akses 17 Agustus 2019.
- Sukristyanto, A.; Jupriono, D.; Darmawan, A.; Maryono. (2018). Political rhetoric of President Joko Widodo: Critical discourse analysis. *Journal of Education and Practice* 9(14), p. 113-117. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/42393/43659>. Akses 17 Agustus 2019.
- Tjandra, S. (2012). Orientasi gerakan buruh. *Kompas*, 1 Mei, hal. 6.
- van de Velde, R.G. (1984). *Prolegomena to inferential discourse processing*. Amsterdam: John Benjamin P.C.
- VOA. (2017). Masyarakat Papua dan masa depan PT Freeport Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakt-papua-dan-masa-depan-pt-freeport-indonesia/3763024.html>. 13 Maret 2017. Akses 17 Agustus 2019.
- Wodak, R. (2010). The Contribution of critical linguistics to the analysis of discriminatory prejudices and stereotypes in the language of politics, in *Handbook of communication in the public sphere*, Wodak, R.; Koller, V.; Berlin, V. (eds.) (p. 291–316) New York: Mouton de Gruyter.

## SUMBER DATA

- Berita Metro*, 22 Feb. 2012. Desak Freeport naikkan royalti, hal. 1, 7.
- Berita Metro*, 27 Feb. 2012. Menata aturan pertambangan: Rawan KKN, kontrol pengawasan lemah, hal. 5.

*Berita Metro*, 28 Feb. 2012. Produksi Freeport berhenti sementara akibat intimidasi karyawan, hal. 5.

*Jawa Pos*, 22 Feb. 2012. 2011, Freeport setor Rp 21 T, hal. 5.

*Kompas*, 20 Feb. 2012. Tambang banyak picu masalah, hal. 1, 15.

**LAMPIRAN**

(Scan Koran *Berita Metro*)

.

# Produksi Freeport Berhenti Sementara

## Akibat Aksi Intimidasi Karyawan

**TIMIKA, (BM)** - PT Freeport Indonesia menghentikan sementara proses produksinya sejak Jumat (24/2) karena terjadi aksi intimidasi bahkan penganiyaan oleh para karyawan yang beberapa waktu lalu menggelar mogok kerja di Timika.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius Mameyau kepada ANTARA di Timika, Senin, membenarkan terhentinya proses produksi PT Freeport selama beberapa hari terakhir.

"Intimidasi yang dilakukan

karyawan peserta mogok kerja terhadap rekan-rekan mereka tidak terjadi di seluruh areal kerja PT Freeport tapi hanya di beberapa titik sehingga manajemen yang menangani langsung di lapangan mengambil keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas produksi," jelas Dionisius, Senin (27/2).

Ia mengatakan, hingga saat ini manajemen PT Freeport belum memberikan laporan secara resmi tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi perusahaan kepada Pemkab

Mimika hingga memicu terhentinya aktivitas produksi perusahaan tambang emas, tembaga dan perak itu.

"Laporan secara resmi dari manajemen Freeport belum ada sehingga kami tidak tahu persis masalah apa yang terjadi, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk membangun komunikasi antara manajemen dengan karyawan," ujar Dionisius.

Terkait kondisi yang terjadi di lingkungan PT Freeport tersebut, Pemkab Mimika akan memanggil manajemen PT Freeport dan pihak Serikat Pekerja untuk menanyakan ma-

salah yang terjadi dan berupaya mencari solusi bersama untuk menyelesaikannya.

Pertemuan yang difasilitasi Pemkab Mimika direncanakan berlangsung pada Kamis (1/3). Juru Bicara PT Freeport Ramdani Sirait mengakui saat ini terjadi gangguan operasional dalam rangka memulihkan kembali operasi perusahaan.

Menurut Ramdani, PT Freeport telah mengikuti semua persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII yang ditandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu dengan pihak Serikat Pekerja.

"Di antara pekerja yang

kembali bekerja terdapat beberapa yang telah melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap rekan-rekan mereka yang tidak mengikuti aksi mogok kerja dan terhadap para penyalahannya," tutur Ramdani.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan bahwa untuk membicarakan masalah yang terjadi antara karyawan yang mogok kerja dengan rekan-rekan mereka yang tidak ikut mogok kerja, dilaksanakan pertemuan seluruh karyawan Freeport bertempat di Community Hall Tembagapura, Senin siang.

Bersamaan dengan itu, pada Senin siang sejumlah Pengurus

SELASA, 28 FEBRUARI 2012

BeritaMetro

5

Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja PT Freeport menggelar pertemuan dengan Kapolda Papua Ijen Pol Bigman Lumban Tobing bertempat di Hotel Rimba Papua, Timika. (ant/hdi)